



BEA CUKAI
SURAKARTA



DISKOMINFO
KABUPATEN KLATEN



AMIN MUSTOFA AJAK CAMAT DAN KEPALA DESA GEMPUR ROKOK ILEGAL

Pedesaan merupakan salah satu target peredaran rokok ilegal. Sehubungan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten, Amin Mustofa mengajak para camat dan kepala desa untuk berperan serta memerangi rokok ilegal.

Menurut Amin Mustofa, Camat dan lurah/kepala desa adalah pejabat yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Dengan demikian peran mereka sangat penting untuk menyampaikan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal.

Dalam kesempatan apapun, baik secara formal maupun informal, para camat dan kepala desa bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait bahaya memproduksi, mengedarkan maupun mengonsumsi rokok ilegal. Selain itu juga bisa memberikan pemahaman bahwa cukai rokok yang resmi akan dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dikarenakan masa pandemi, Diskominfo belum bisa mengumpulkan atau mengundang para camat dan kepala desa/lurah untuk sosialisasi secara offline. Namun demikian, dengan adanya sosialisasi secara online yang digencarkan selama ini, bisa diteruskan oleh para camat dan kepala desa/lurah pada masyarakat di wilayah masing-masing.

"Mohon maaf, sekarang belum bisa mengundang rekan-rekan



Amin Mustofa Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten.

camat dan kepala desa/lurah. Semoga tahun depan masih dipercaya bea cukai dan pandemi sudah usai, sehingga kami bisa sosialisasi gempur rokok ilegal secara offline, bersama camat dan kepala desa/lurah," kata Amin Mustofa.

Kepala Desa Barepan, Kecamatan Cawas Irmawan Andriyanto mengungkapkan, selalu mendukung program Gempur Rokok Ilegal. "Di wilayah Desa Barepan sudah terpasang baliho Gempur Rokok Ilegal. Lokasinya strategis, disamping empat Taman Desa Barepan," kata Irmawan Andriyanto.

Sosialisasi dengan media

baliho ini dinilai sangat efektif, karena Taman Barepan yang merupakan ikon Kecamatan Cawas tersebut, banyak dikunjungi warga. Kompleks Taman Barepan menjadi salah satu pusat wisata kuliner di Kecamatan Cawas, sehingga banyak pengunjung yang bisa membaca misi sosialisasi pada baliho tersebut.

Selain itu disetiap kesempatan rapat dan pertemuan dengan lembaga di desa, Kades berusaha menyampaikan bahaya memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi rokok ilegal.

Kades Barepan berharap bantuan DBHCHT, selain untuk daerah bidang pertanian tembakau, juga untuk

pertanian komoditas selain tembakau. "Warga yang mengonsumsi rokok, bukan hanya daerah yang produksi pertanian tembakau, tetapi juga yang lain," tambah Irmawan Andriyanto.

Hal senada disampaikan oleh Untung Pranoto, Kepala Desa Tambakboyo, Kecamatan Pedan. "Program Pemerintah tentang Gempur Rokok Ilegal harus kita dukung dengan ikut mensosialisasikan kepada ketua RT dan RW, agar disampaikan kepada pengusaha toko kelontong dan warga. Dengan demikian, mereka tahu bahaya dan konsekuensi hukum jika memproduksi, berdagang dan mengonsumsi rokok ilegal tersebut," kata Untung Pranoto. (Sit)

Diskominfo Klaten Gandeng Kalangan Muda



Para pemenang lomba film pendek.

Dalam upaya memerangi rokok ilegal, Diskominfo Kabupaten Klaten dan Kantor Bea Cukai Surakarta juga merangkul generasi muda. Terobosan yang dijadikan media sosialisasi adalah dengan menggelar lomba foto dan film pendek se ilayah eks Karesidenan Surakarta, dengan tema stop cukai rokok ilegal.

Ajang lomba film pendek dan foto tersebut mendapat sambutan luar biasa dari kalangan muda. karya-karya mereka cukup menarik dan tidak hanya memberikan pencerahan pada kalangan muda saja, melainkan juga sangat mengena untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat secara umum.

Ajang lomba tersebut mendapat apresiasi tinggi dari sutradara nasional Fajar Nugros. Ia mengemukakan, telah menyaksikan film-film pendek karya anak-anak muda se Surakarta. Karya-karya tersebut dinilai sebagai potensi luar biasa, mampu merekam cerita menarik, keresahan sosial dan keresahan masyarakat di wilayah Surakarta.

"Ini sesuatu yang menarik, bagi Pemkab Klaten yang mau menyelenggarakan lomba film pendek tersebut. Kami harapkan ke depan juga terus memberikan perhatian dan melestarikan program ini, sehingga dari Klaten dan Surakarta lahir sutradara dan film maker baru. Untuk kemajuan perfilman nasional yang butuh bakat-

bakat muda," kata Fajar Nugros.

Lebih lanjut Fajar Nugros menjelaskan, sebagai film maker juga harus memiliki kesadaran hukum, kesadaran sosial dan kesadaran moral terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar.

Untuk membuat karya film yang baik, harus mengajukan ijin dengan baik, menghubungi pemerintah daerah setempat dan pihak keamanan sehingga bisa berkarya dengan baik. Sebagai anak muda, harus mengikuti proses prosedur hukum yang berlaku.

Saat di sekitar ada produk tertentu yang tidak memenuhi ketentuan aturan, sebagai film maker harus mengingatkan pada publik. Salah satunya rokok ilegal yang tak punya cukai dalam artian tidak membayar pajak. Produsen nakal yang tak bayar pajak tersebut merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Pajak yang tak masuk ke negara itu tak bisa dipakai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat tidak sejahtera, ketika kita membuat film, tak ada target market yang baik. Masyarakat yang makmur akhirnya akan mencari hiburan dan itu penting bagi industri film. Ini lingkaran setan yang harus kita benahi sejak dini. Film maker perlu membangkitkan kesadaran hukum untuk membayar pajak. Itu penting," tambah Fajar Nugros. (Sit)

Tulisan dan foto : Sri Warsiti



Kades Barepan (tengah) selalu menyampaikan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di berbagai kegiatan.



Aries Baroto memberikan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal.



**PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG CUKAI**

Pasal 54	ROKOK POLOS ATAU TANPA CUKAI
Pasal 55	ROKOK PITA CUKAI PALSU
Pasal 56	ROKOK PITA CUKAI BEKAS
Pasal 29	ROKOK PITA CUKAI BERBEDA
Pasal 58	ROKOK PITA CUKAI SALAH PERSONALISASI

DASAR HUKUM

No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Rokok Ilegal
Adalah rokok impor/ rokok produksi dalam negeri yang berada diperedaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.





PITA CUKAI PALSU



PITA CUKAI BERBEDA



PITA CUKAI BEKAS



POLOS ATAU TANPA PITA CUKAI

**LAPORKAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT**

**HUBUNGI
1500 225**



**STOP
ROKOK ILEGAL**

Hj. Sri Mulyani, S.M.
Bupati Klaten